



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai "Kajian Kemitraan Pengelolaan Air Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang" ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu mulai bulan Desember 2009 hingga Januari 2010. Pengambilan data lapangan dilaksanakan di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dari wilayah pengamatan dipilih tiga desa contoh yaitu Desa Burno, Desa Kandang Tepus, dan Desa Argosari.

3.2 Objek dan Alat Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah kondisi sosial ekonomi yang terdapat pada pengelolaan air Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kecamatan Senduro. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, daftar pertanyaan wawancara, peta, kamera digital, dan komputer untuk mengolah data.

3.3 Jenis Data

Data yang diambil terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola taman nasional, pemerintah kabupaten, dinas pemerintah, PDAM, aparat kecamatan dan desa, LSM, Himpunan Pemanfaat Air Minum (HiPAM), penyuluh lapangan, dan masyarakat. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dari pihak-pihak mitra yang diamati sebagai data penunjang.

3.1 Jenis data untuk mengetahui sistem kemitraan

Jenis data yang dibutuhkan untuk mengetahui sistem kemitraan yang berlangsung pada pengelolaan air TNBTS diperoleh dengan cara penelusuran dokumen dari pihak TNBTS mulai dari balai besar hingga tingkat resort.

3.2 Jenis data untuk mengetahui sikap masyarakat

Jenis data yang dibutuhkan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem kemitraan pengelolaan air TNBTS diperoleh dengan cara meminta tanggapan responden dalam mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan air TNBTS, pengaruh kemitraan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan harapan masyarakat terhadap sistem kemitraan. Jenis data tersebut dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5 Jenis data untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem kemitraan pengelolaan air TNBTS

No.	Parameter	Jenis data
1.	Tingkat pengetahuan masyarakat	1. Tingkat pengetahuan masyarakat 2. Pendapat tentang sistem kemitraan
	Pengaruh kemitraan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat	1. Pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat 2. Permasalahan kemitraan 3. Dampak positif kemitraan 4. Dampak negatif kemitraan
	Harapan terhadap sistem kemitraan	1. Harapan terhadap kegiatan kemitraan

Data sekunder untuk menunjang sikap masyarakat meliputi data demografi Kecamatan Senduro yang diperoleh dari kantor kecamatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang periode tahun 2009.

4 Metode Pengumpulan Data

4.1 Studi literatur

Studi literatur melalui penelusuran dokumen dan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pengelolaan air diantara pihak-pihak yang terkait, diantaranya mencakup:

- i. Hasil penelusuran dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah, air, dan kehutanan.
- ii. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Peta wilayah kerja, peta potensi sumberdaya air, data pendapatan, data hidrologi, dan laporan internal taman nasional.
- iii. Pemda kabupaten, dinas pemerintah kabupaten, serta aparat kecamatan dan desa: Peta wilayah, data penduduk, penggunaan air, data ekonomi, pendapatan, dan data catatan sipil, surat kontrak kerjasama, dan lain-lain.
- iv. PDAM Kabupaten Lumajang: Peta wilayah kerja, data kelembagaan, data produksi dan pembiayaan, serta surat kerjasama dan peraturan lainnya.
- v. LSM dan HiPAM: Data pokok kelembagaan, kerjasama, dan kontrak perjanjian.
- vi. Literatur pendukung lainnya.

3.4.2 Observasi dan Wawancara

Observasi lapang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan membandingkan kondisi data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Wawancara kepada responden dilakukan secara mendalam, penentuan responden berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Unit contoh pada pihak mitra di lembaga-lembaga tertentu diarahkan pada staf yang berkompeteren di bidangnya. Responden wawancara masyarakat dilakukan secara *random sampling* kepada 30 orang yang tersebar pada ketiga desa contoh. Keterangan mengenai metode pengumpulan data dijabarkan lebih rinci pada Tabel 6.

Tabel 6 Metode pengumpulan data

No.	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan
	Data Pokok		
1.	Proses kesepakatan kemitraan	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang	Penelusuran dokumen dan wawancara
2.	Analisis <i>Stakeholder</i> - Identifikasi para pihak - Tingkat akses kepentingan serta peran dan fungsi para pihak - Klasifikasi <i>stakeholder</i>	- Masyarakat - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat	Wawancara Penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara Observasi dan wawancara
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat	Penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara Observasi dan wawancara
4.	Permasalahan Kegiatan Kemitraan	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang	Penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara

Tabel 6 Metode pengumpulan data (lanjutan)

No.	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan
5.	Dampak Sosial-Ekonomi Sistem Kemitraan	- Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Observasi dan wawancara
		- Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat	Penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara
6.	Harapan Terhadap Sistem Kemitraan	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat	Observasi dan wawancara
		- Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan - LSM dan HiPAM - Penyuluh Lapang - Masyarakat	Observasi dan wawancara
1.	Data Pendukung Kondisi Umum Lokasi	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - BPS Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan	Penelusuran dokumen
2.	Rencana Pengelolaan	- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - BPS Kabupaten Lumajang - PDAM Kabupaten Lumajang - Dinas Pemerintah Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan	Penelusuran dokumen
3.	Data sosial-ekonomi	- BPS Kabupaten Lumajang - Kantor Desa dan Kecamatan	Penelusuran dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data terkait kemitraan pengelolaan air dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif melalui *cross check* antara hasil tabulasi data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengumpulan data dilanjutkan dengan metode triangulasi untuk tahap konfirmasi dan verifikasi data. Sesuai tujuan penelitian, prosesnya dijabarkan sebagai berikut:

3.5.1 Sistem kemitraan

Analisis dilakukan dengan cara mengolah data yang berhubungan dengan proses dalam pelaksanaan kemitraan. Data yang diolah meliputi proses kesepakatan kerjasama, latar belakang pelaku kemitraan, karakteristik para pihak, peran dan fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hingga pada tahap klasifikasi para pihak pada sistem kemitraan yang berlangsung. Proses kesepakatan kerjasama ditelusuri mulai dari perencanaan yang melibatkan pihak IPB TNBTS, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa pada awal masa kerjasama. Melalui koordinasi dengan para pihak yang mendukung terbentuknya kemitraan maka para pihak berkembang dengan cakupan yang lebih luas.

Pengolahan data mengenai kesesuaian rencana kerjasama dengan pelaksanaannya didasarkan pada surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh pihak taman nasional dan pihak mitra. Perjanjian kerjasama tersebut mengacu pada Kepmenhut Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis isi, yaitu analisis terhadap substansi surat kesepakatan kerjasama untuk mengetahui penyelenggaraan kerjasama dalam sistem kemitraan. Hal-hal yang diamati meliputi latar belakang kesepakatan, dasar hukum, proses kesepakatan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, hingga pada tahap evaluasi surat kesepakatan kerjasama.

Sesuai definisi Kantor MNLH (1998), kebijakan merupakan tujuan-tujuan dan pengarah aksi yang diikuti oleh suatu pemerintah, organisasi, atau individu dan merupakan suatu haluan (Soekanto 1983 diacu dalam Kantor MNLH 1998). Oleh karena itu, kebijakan dapat berupa keputusan tetap yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh mereka yang memenuhi dan menyetujui keputusan tersebut. Penelitian ini juga membahas analisis kebijakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



bentuk proses metode penelitian dengan cara menganalisis informasi dan argumentasi terkait kebijakan kemitraan. Sesuai metodenya, digunakan ketiga pendekatan, yaitu empiris (sebab-akibat), evaluatif (penilaian hasil), dan normatif (rekomendasi).

Adapun penilaian terhadap partisipasi para pihak dilakukan menurut beberapa pendekatan. Penilaian terhadap akses kepentingan para pihak menurut Grimble (1997) dilakukan dalam beberapa kriteria diantaranya mengenaiingkauan sejauh mana para pihak tersebut dibutuhkan dalam fungsinya pada organisasi, bernilai pada organisasi, mempengaruhi perjalanan organisasi, menentukan atau mempengaruhi kejadian, punya nama baik yang signifikan, dan memanfaatkan kewenangan.

5.2 Analisis stakeholder

Pada tahap mengetahui karakteristik para pihak digunakan analisis *stakeholder* untuk menilai pihak-pihak yang bermitra dalam pengelolaan air. Secara definisi, analisis *stakeholder* merupakan suatu pendekatan untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci didalam sistem serta mengukur kepentingan masing-masing pihak dalam sistem tersebut (Grimble dan Chan 1995). Identifikasi para pihak merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam analisis *stakeholder*. Para pihak yang dimaksud adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dengan upaya konservasi kawasan serta mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan.

Salah satu cara dalam mempelajari karakteristik para pihak adalah melalui analisis kekuatan *stakeholder* yang bertujuan untuk menjelaskan peran *stakeholder* yang sifat dan hubungannya berbeda satu sama lain. Pada salah satu bagian analisis *stakeholder* ini terdapat suatu metode pendekatan yang disebut sebagai analisis 4R (*rights, responsibilities, revenues, dan relationship*) yang membagi *stakeholder* menurut hak, tanggung jawab, manfaat yang diterima, serta hubungan diantara masing-masing pihak tersebut (Wollenberg 2005).

Apabila analisis *stakeholder* melihat pada perbedaan hubungan para pihak dengan sumberdaya hutan, maka metode analisis 4R melihat bagaimana *stakeholder* terhubung satu sama lain atas penggunaan hutan. Analisis terdiri dari dua komponen yaitu menilai keseimbangan tiga R pertama (hak, tanggung jawab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan manfaat), baik didalam maupun diantara *stakeholder* dan yang kedua menetapkan status R keempat, yaitu hubungan diantara *stakeholder* (Mayers 2001). Dalam prakteknya, data yang dikumpulkan dari metode ini disajikan dalam bentuk tabulasi hasil observasi dan data lapang.

Menurut tujuannya, analisis 4R diantaranya digunakan untuk menjelaskan peran yang dimiliki *stakeholder* yang berbeda sifat dan hubungan diantara mereka. Penilaian dan negosiasi peran dan hubungan antar *stakeholder* selanjutnya dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan dan institusi. Melalui pendekatan skoring nilai relatif, Tekwe-Percy (2000) mengklasifikasikannya dalam suatu tabel pengelompokkan *stakeholder*. Beberapa definisi yang menjelaskan tentang hak, tanggung jawab, dan manfaat tersebut diantaranya (Tekwe-Percy 2000):

Hak, didefinisikan sebagai :

- Akses dan penggunaan hasil hutan yang berupa hak yang lazim atau hak yang dapat dibeli
- Akses pekerjaan yang berasal dari hutan masyarakat

Tanggung jawab, berhubungan dengan:

- Tugas-tugas pengelolaan hutan, pengukuran, monitoring dan kontrol, koordinasi, pengambilan keputusan
- Pelaksanaan keputusan pada aturan, prosedur, dan penerima manfaat
- Kepatuhan terhadap aturan

c. Manfaat, yang berarti:

- Manfaat langsung yang muncul mulai dari awal hingga sumberdaya hutan dimanfaatkan
- Manfaat langsung yang muncul dari pekerjaan pengelolaan hutan masyarakat
- Manfaat tidak langsung yang muncul dari pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat yang menggunakan dana pembangunan masyarakat hutan

Penilaian terakhir yang dilakukan melalui analisis 4R adalah hubungan diantara masing-masing *stakeholder* dalam sistem kemitraan. Hubungan ini didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya (Mayers 2001):

- Kualitas hubungan berdasarkan konvergensi pendapat *stakeholder* (misalnya baik, moderat, atau konflik)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Kekuatan hubungan, yang berkaitan dengan frekuensi dan intensitas kontak
- Formalitas hubungan; formal maupun informal
- Ketergantungan antara *stakeholder*

Cara menganalisis *stakeholder* yang terlibat dalam suatu proses juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan para pihak menurut tingkat kepentingan dan pengaruh yang muncul dalam pelibatan pada proses kemitraan. Kepentingan dalam pengertian tersebut didasarkan pada tingkat perlu atau tidaknya suatu pihak dalam sistem. Jika suatu pihak mutlak harus ada maka kepentingannya besar, begitu pula sebaliknya dengan tingkatan tertentu secara kualitatif. Adapun pengaruh merupakan tingkatan besarnya kekuatan dalam mendukung atau menghambat sistem. Kekuatan dapat berupa hak secara formal dalam hal wewenang sampai kepada aspek informal yang dimiliki pihak tertentu dalam mempengaruhi pihak lain untuk mengikuti suatu maksud. Pengaruh yang besar pada suatu pihak berarti pihak tersebut lebih mudah mempengaruhi pihak lain, sementara pengaruh yang kecil berarti suatu pihak tidak dapat terlalu banyak untuk mempengaruhi hasil tindakan yang diinginkan.

Melalui metode ini, Mayers (2001) melakukan pendekatan melalui langkah-langkah membandingkan kekuatan dan peran potensial *stakeholder*. Pengukuran pengaruh dinilai dari kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh suatu pihak untuk proses dan hasil proyek. Sedangkan kepentingan dinilai dari besarnya peran dalam mencapai hasil dan tujuan proyek. Proses ini kemudian dapat menjelaskan pola tingkatan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*impact*) dimiliki oleh masing-masing pihak. Para pihak tersebut kemudian dibedakan menurut kriteria sebagai berikut:

- *Stakeholder* primer langsung, merupakan penerima langsung keuntungan dari hasil kerjasama
- *Stakeholder* primer tidak langsung bukan merupakan penerima keuntungan hasil kerjasama tetapi hanya akan terpengaruh oleh hasil kerjasama
- *Stakeholder* sekunder adalah pihak selain kedua kelompok diatas tetapi terlibat dalam proses kerjasama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



3.5.3 Sosial ekonomi masyarakat

Kajian mengenai sosial ekonomi masyarakat dilakukan untuk mengetahui dampak kemitraan terhadap sosial ekonomi masyarakat dan harapan masyarakat terhadap kemitraan. Dampak sosial ekonomi kemitraan tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif pada hubungan kemitraan yang telah berlangsung. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah data dan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kemitraan. Pengamatan dilakukan dalam menilai pengaruh sistem kemitraan terhadap kondisi sosial ekonomi bagi lembaga serta masyarakat yang terlibat pengelolaan air melalui metode observasi dan wawancara yang dihubungkan dengan parameter demografi.

3.5.4 Permasalahan kemitraan

Analisis permasalahan kemitraan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kegiatan kemitraan dan upaya solusi untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemitraan tersebut. Pengolahan data permasalahan kemitraan dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumentasi laporan yang meliputi persepsi pelaku kemitraan terhadap kegiatan kemitraan yang sedang/telah berjalan serta hal-hal yang menjadi permasalahan bagi pihak mitra dalam menjalankan posisinya pada hubungan kemitraan.

3.5.5 Evaluasi sistem kemitraan

Evaluasi kemitraan termasuk pada evaluasi kawasan pelestarian alam yang tercantum dalam Permenhut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Evaluasi ini bertujuan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam pengelolaan. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi yang sebelumnya telah ditetapkan kriterianya sebagai bahan penentuan kebijakan.

Sehubungan dengan kerjasama pengelolaan air yang dikaji, evaluasi sistem kemitraan dilakukan untuk menilai keberhasilan proyek secara menyeluruh. Analisis deskriptif dilakukan dengan penilaian dari sudut pandang posisi masing-masing pihak dalam kemitraan, peran dan tanggung jawab para

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



stakeholder, tingkat keberhasilan kemitraan, dan hal-hal terkait lainnya sebagai pedoman. Pada akhirnya evaluasi kemitraan dapat dilakukan melalui penilaian kriteria yang menentukan keberhasilan kemitraan. Menurut WWF-UK (2000) diacu dalam Komite PPA-MFP dan Yayasan WWF-Indonesia (2006), setidaknya terdapat 19 kriteria kemitraan yang menentukan penilaian kemitraan. Kriteria tersebut kemudian dapat disederhanakan menjadi delapan poin dalam tiga prinsip utama evaluasi kemitraan. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan pada Tabel 7.

Tabel 7 Tiga prinsip dalam panduan evaluasi kemitraan

<i>Basic Principle</i>	<i>Enabling Principle</i>	<i>Sufficient Principle</i>
Kesepakatan peran dan tanggung jawab	- Komitmen kerja berdasarkan nilai-nilai bersama	- Saling tanggung-gugat
Kesepakatan hak dan kewajiban	- Kesukarelaan untuk bermitra	- Transparansi pengambilan keputusan
Kesetaraan distribusi biaya dan manfaat		

Sumber: Komite PPA-MFP dan Yayasan WWF-Indonesia (2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.